



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.598, 2014

KEMENHUT. Penulisan. Kode Referensi. 15  
Digit. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR P.24/Menhut-II/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR  
P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN  
REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA  
HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA  
PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);**
  - b. bahwa dalam perkembangan pemerintahan, telah terbit berbagai Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota baru;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan**

Nomor P.28/Menhut-II/2007 tersebut huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3759);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI (DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH).**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2006 tentang Tata Cara Penulisan Referensi 15 Digit Pada Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, dengan mengubah angka 7 dan menambah dua angka baru yaitu angka 8 dan angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

7. Bank Penerima adalah Bank yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan untuk menerima setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dalam hal ini Bank Mandiri beserta cabang-cabangnya.

8. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

(1a) Penetapan referensi 15 (lima belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa berlaku izin.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Kode Provinsi sebanyak 2 (dua) digit dan kode Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) digit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan digit ke (1,2,3,4) ditetapkan oleh Menteri.
  - (2) Kode Provinsi dan Kode Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, dengan menambah satu ayat baru yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

(2) Penetapan kode Provinsi baru dan kode Kabupaten/Kota baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

(1) Pembayaran PSDH atau DR atau IIUPH melalui setoran langsung pada Bank Penerima wajib menuliskan kode referensi 15 (lima belas) digit di kolom berita untuk penerima pada Formulir Setoran (Deposit Form) Bank Penerima.

**Pasal II**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2014  
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.24/Menhut-II/2014

## TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEHUTANAN NOMOR P.16/MENHUT-II/2006 TENTANG TATA  
CARA PENULISAN REFERENSI 15 DIGIT PADA PEMBAYARAN  
PROVISI SUMBER DAYA HUTAN (PSDH), DANA REBOISASI  
(DR), DAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (IIUPH)

DAFTAR KODE PROVINSI DAN KODE KABUPATEN/KOTA SISTEM SETORAN  
PSDH, DR, DAN IIUPH DENGAN KODEFIKASI 15 DIGIT

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
1	ACEH	01	KAB. ACEH BESAR
		02	KAB. ACEH PIDIE
		03	KAB. ACEH UTARA
		04	KAB. ACEH TIMUR
		05	KAB. ACEH SELATAN
		06	KAB. ACEH BARAT
		07	KAB. ACEH TENGAH
		08	KAB. ACEH TENGGARA
		09	KAB. SIMEULEU
		10	KAB. BIREUN
		11	KAB. ACEH SINGKIL
		12	KOTA SABANG
		13	KOTA BANDA ACEH
		14	KOTA LHOKSEUMAWE
		15	KOTA LANGSA
		16	KAB. ACEH BARAT DAYA
		17	KAB. GAYO LUES
		18	KAB. ACEH JAYA
		19	KAB. NAGAN RAYA
		20	KAB. ACEH TAMIANG
		21	KAB. BENER MERIAH
		22	KAB. PIDIE JAYA

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
2.	SUMATERA UTARA	23	KOTA SUBULUSSALAM
		01	KAB. DELI SERDANG
		02	KAB. TANAH KARO
		03	KAB. LANGKAT
		04	KOTA PADANG SIDEMPUAN
		05	KAB. TAPANULI TENGAH
		06	KAB. SIMALUNGUN
		07	KAB. LABUHANBATU
		08	KAB. DAIRI
		09	KAB. TAPANULI UTARA
		10	KAB. TAPANULI SELATAN
		11	KAB. ASAHAN
		12	KAB. NIAS
		13	KAB. TOBA SAMOSIR
		14	KAB. MANDAILING NATAL
		15	KOTA MEDAN
		16	KOTA TEBING TINGGI
		17	KOTA BINJAI
		18	KOTA PEMATANG SIANTAR
		19	KOTA TANJUNG BALAI
		20	KOTA SIBOLGA
		21	KAB. PAKPAK BARAT
		22	KAB. NIAS SELATAN
		23	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
		24	KAB. SAMOSIR
		25	KAB. SERDANG BEDAGAI
		26	KAB. BATUBARA
		27	KAB. LABUHANBATU SELATAN
		28	KAB. LABUHANBATU UTARA
		29	KAB. NIAS BARAT
		30	KAB. NIAS UTARA



KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		31	KAB. PADANG LAWAS
		32	KAB. PADANG LAWAS UTARA
		33	KOTA GUNUNGSITOLI
3	SUMATERA BARAT	01	KAB. AGAM
		02	KAB. PASAMAN
		03	KAB. LIMA PULUH KOTA
		04	KAB. SOLOK
		05	KAB. PADANG PARIAMAN
		06	KAB. PESISIR SELATAN
		07	KAB. TANAH DATAR
		08	KAB. SIJUNJUNG (d.h. SAWAH LUNTO SIJUNJUNG)
		09	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
		10	KOTA BUKIT TINGGI
		11	KOTA PADANG PANJANG
		12	KOTA SAWAHLUNTO
		13	KOTA SOLOK
		14	KOTA PADANG
		15	KOTA PAYAKUMBUH
		16	KOTA PARIAMAN
		17	KAB. DHARMASRAYA
		18	KAB. SOLOK SELATAN
		19	KAB. PASAMAN BARAT
4	JAMBI	01	KAB. BATANGHARI
		02	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
		03	KAB. BUNGO
		04	KAB. MERANGIN
		05	KAB. KERINCI
		06	KAB. SAROLANGUN
		07	KAB. TEBO
		08	KAB. MUARO JAMBI

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		09	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
		10	KOTA JAMBI
		11	KOTA SUNGAI PENUH
5	SUMATERA SELATAN	01	KAB. MUSI BANYUASIN
		02	KAB. OGAN KOMERING ULU
		03	KAB. MUARA ENIM
		04	KAB. LAHAT
		05	KAB. MUSI RAWAS
		06	KAB. OGAN KOMERING ILIR
		07	KOTA PALEMBANG
		08	KOTA PRABUMULIH
		09	KOTA LUBUK LINGGAU
		10	KOTA PAGAR ALAM
		11	KAB. BANYUASIN
		12	KAB. OKU TIMUR
		13	KAB. OKU SELATAN
		14	KAB. OGAN ILIR
		15	KAB. EMPAT LAWANG
		16	KAB. MUSI RAWAS UTARA
		17	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
6	RIAU	01	KAB. KAMPAR
		02	KAB. BENGKALIS
		03	*)
		04	KAB. INDRAGIRI HULU
		05	KAB. INDRAGIRI HILIR
		06	KAB. PELALAWAN
		07	KAB. ROKAN HULU
		08	KAB. ROKAN HILIR
		09	KAB. SIAK
		10	*)

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		11	*)
		12	KAB. KUANTAN SINGINGI
		13	KOTA PEKANBARU
		14	*)
		15	KOTA DUMAI
		16	*)
		17	KAB. KEPULAUAN MERANTI
7	BENGKULU	01	KAB. BENGKULU UTARA
		02	KAB. BENGKULU SELATAN
		03	KAB. REJANG LEBONG
		04	KOTA BENGKULU
		05	KAB. KAUR
		06	KAB. SELUMA
		07	KAB. MUKO-MUKO
		08	KAB. LEBONG
		09	KAB. KEPAHYANG
		10	KAB. BENGKULU TENGAH
8	LAMPUNG	01	KAB. LAMPUNG SELATAN
		02	KAB. LAMPUNG TENGAH
		03	KAB. LAMPUNG UTARA
		04	KAB. LAMPUNG BARAT
		05	KAB. TULANG BAWANG
		06	KAB. TANGGAMUS
		07	KAB. WAY KANAN
		08	KAB. LAMPUNG TIMUR
		09	KOTA METRO
		10	KOTA BANDANG LAMPUNG
		11	KAB. MESUJI
		12	KAB. PESAWARAN
		13	KAB. PESISIR BARAT
		14	KAB. PRINGSEWU

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		15	KAB. TULANG BAWANG BARAT
9	BANGKA BELITUNG	01	KAB. BANGKA
		02	KAB. BELITUNG
		03	KOTA PANGKAL PINANG
		04	KAB. BANGKA SELATAN
		05	KAB. BANGKA TENGAH
		06	KAB. BANGKA BARAT
		07	KAB. BELITUNG TIMUR
10	DKI JAKARTA	01	KOTA JAKARTA PUSAT
		02	KOTA JAKARTA TIMUR
		03	KOTA JAKARTA BARAT
		04	KOTA JAKARTA UTARA
		05	KOTA JAKARTA SELATAN
		06	KAB. KEPULAUAN SERIBU
11	JAWA BARAT	01	KAB. CIAMIS
		02	KAB. BOGOR
		03	KAB. SUKABUMI
		04	KAB. CIANJUR
		05	KAB. BEKASI
		06	KAB. KARAWANG
		07	KAB. PURWAKARTA
		08	KAB. SUBANG
		09	KAB. BANDUNG
		10	KAB. SUMEDANG
		11	KAB. GARUT
		12	KAB. TASIKMALAYA
		13	KAB. CIREBON
		14	KAB. KUNINGAN
		15	KAB. INDRAMAYU
		16	KAB. MAJALENGKA
		17	KOTA BANDUNG

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		18	KOTA BOGOR
		19	KOTA SUKABUMI
		20	KOTA CIREBON
		21	KOTA BEKASI
		22	KOTA DEPOK
		23	KOTA CIMAHI
		24	KOTA TASIKMALAYA
		25	KOTA BANJAR
		26	KAB. PANGANDARAN
		27	KAB. BANDUNG BARAT
12	BANTEN	01	KAB. SERANG
		02	KAB. PANDEGLANG
		03	KAB. LEBAK
		04	KAB. TANGERANG
		05	KOTA TANGERANG
		06	KOTA CILEGON
		07	KOTA SERANG
		08	KOTA TANGERANG SELATAN
13	JAWA TENGAH	01	KAB. SEMARANG
		02	KAB. KENDAL
		03	KAB. DEMAK
		04	KAB. GROBOGAN
		05	KAB. PEKALONGAN
		06	KAB. BATANG
		07	KAB. TEGAL
		08	KAB. BREBES
		09	KAB. PATI
		10	KAB. KUDUS
		11	KAB. PEMALANG
		12	KAB. JEPARA
		13	KAB. REMBANG

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		14	KAB. BLORA
		15	KAB. BANYUMAS
		16	KAB. CILACAP
		17	KAB. PURBALINGGA
		18	KAB. BANJARNEGARA
		19	KAB. MAGELANG
		20	KAB. TEMANGGUNG
		21	KAB. WONOSOBO
		22	KAB. PURWOREJO
		23	KAB. KEBUMEN
		24	KAB. KLATEN
		25	KAB. BOYOLALI
		26	KAB. SRAGEN
		27	KAB. SUKOHARJO
		28	KAB. KARANGANYAR
		29	KAB. WONOGIRI
		30	KOTA SEMARANG
		31	KOTA SALATIGA
		32	KOTA PEKALONGAN
		33	KOTA TEGAL
		34	KOTA MAGELANG
		35	KOTA SURAKARTA
14	DISTA YOGYAKARTA	01	KAB. BANTUL
		02	KAB. SLEMAN
		03	KAB. GUNUNG KIDUL
		04	KAB. KULON PROGO
		05	KOTA YOGYAKARTA
15	JAWA TIMUR	01	KAB. GRESIK
		02	KAB. MOJOKERTO
		03	KAB. SIDOARJO
		04	KAB. JOMBANG

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		05	KAB. SAMPANG
		06	KAB. PAMEKASAN
		07	KAB. SUMENEP
		08	KAB. BANGKALAN
		09	KAB. BONDOWOSO
		10	KAB. SITUBONDO
		11	KAB. BANYUWANGI
		12	KAB. JEMBER
		13	KAB. MALANG
		14	KAB. PASURUAN
		15	KAB. PROBOLINGGO
		16	KAB. LUMAJANG
		17	KAB. KEDIRI
		18	KAB. TULUNGAGUNG
		19	KAB. NGANJUK
		20	KAB. TRENGGALEK
		21	KAB. BLITAR
		22	KAB. MADIUN
		23	KAB. NGAWI
		24	KAB. MAGETAN
		25	KAB. PONOROGO
		26	KAB. PACITAN
		27	KAB. BOJONEGORO
		28	KAB. TUBAN
		29	KAB. LAMONGAN
		30	KOTA SURABAYA
		31	KOTA MOJOKERTO
		32	KOTA MALANG
		33	KOTA PASURUAN
		34	KOTA PROBOLINGGO
		35	KOTA BLITAR

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		36	KOTA KEDIRI
		37	KOTA MADIUN
		38	KOTA BATU
16	KALIMANTAN BARAT	01	KAB. SAMBAS
		02	KAB. SANGGAU
		03	KAB. SINTANG
		04	KAB. PONTIANAK
		05	KAB. KAPUAS HULU
		06	KAB. KETAPANG
		07	KAB. BENGKAYANG
		08	KAB. LANDAK
		09	KOTA PONTIANAK
		10	KOTA SINGKAWANG
		11	KAB. MELAWI
		12	KAB. SEKADAU
		13	KAB. KAYONG UTARA
		14	KAB. KUBU RAYA
17	KALIMANTAN TENGAH	01	KAB. KAPUAS
		02	KAB. BARITO UTARA
		03	KAB. BARITO SELATAN
		04	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
		05	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
		06	KOTA PALANGKARAYA
		07	KAB. KATINGAN
		08	KAB. SERUYAN
		09	KAB. SUKAMARA
		10	KAB. LAMANDAU
		11	KAB. GUNUNG MAS
		12	KAB. PULANG PISAU
		13	KAB. MURUNG RAYA



KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		14	KAB. BARITO TIMUR
18	KALIMANTAN SELATAN	01	KAB. BANJAR
		02	KAB. TANAH LAUT
		03	KAB. TAPIN
		04	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
		05	KAB. HULU SUGAI TENGAH
		06	KAB. BARITO KUALA
		07	KAB. TABALONG
		08	KAB. KOTA BARU
		09	KAB. HULU SUNGAI UTARA
		10	KOTA BANJARMASIN
		11	KOTA BANJARBARU
		12	KAB. TANAH BUMBU
		13	KAB. BALANGAN
19	KALIMANTAN TIMUR	01	KAB. KUTAI KARTANEGARA
		02	KAB. PASIR
		03	*)
		04	KAB. BERAU
		05	*)
		06	*)
		07	KAB. KUTAI BARAT
		08	KAB. KUTAI TIMUR
		09	KOTA SAMARINDA
		10	KOTA BALIK PAPAN
		11	KOTA BONTANG
		12	*)
		13	KAB. PENAJAM PASER UTARA
		14	*)
		15	KABUPATEN MAHAKAM ULU
20	SULAWESI UTARA	01	KAB. MINAHASA
		02	KAB. BOLAANG MONGONDOW

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		03	KAB. SANGIHE TALAUD
		04	KOTA MANADO
		05	KOTA BITUNG
		06	KAB. KEPULAUAN TALAUD
		07	KAB. MINAHASA SELATAN
		08	KOTA TOMOHON
		09	KAB. MINAHASA UTARA
		10	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
		11	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR
		12	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
		13	KAB. KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
		14	KAB. MINAHASA TENGGARA
		15	KOTA KOTAMOBAGU
21	GORONTALO	01	KAB. GORONTALO
		02	KAB. BOALEMO
		03	KOTA GORONTALO
		04	KAB. PAHUWATO
		05	KAB. BONE BOLANGO
		06	KAB. GORONTALO UTARA
22	SULAWESI TENGAH	01	KAB. POSO
		02	KAB. DONGGALA
		03	KAB. TOLI-TOLI
		04	KAB. BANGGAI
		05	KAB. BUOL
		06	KAB. MOROWALI
		07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
		08	KOTA PALU

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		09	KAB. PARIGI MOUTONG
		10	KAB. TOJU UNA UNA
		11	KAB. BANGGAI LAUT
		12	KAB. MOROWALI UTARA
		13	KAB. SIGI
23	SULAWESI TENGGARA	01	KAB. KONAWE (d.h. KENDARI)
		02	KAB. BUTON
		03	KAB. MUNA
		04	KAB. KOLAKA
		05	KOTA KENDARI
		06	KOTA BAU-BAU
		07	KAB. KONAWE SELATAN
		08	KAB. BOMBANA
		09	KAB. WAKATOBI
		10	KAB. KOLAKA UTARA
		11	KAB. BUTON UTARA
		12	KAB. KOLAKA TIMUR
		13	KAB. KONAWE KEPULAUAN
		14	KAB. KONAWE UTARA
24	SULAWESI SELATAN	01	KAB. PINRANG
		02	KAB. GOWA
		03	KAB. WAJO
		04	*)
		05	KAB. BONE
		06	KAB. TANA TORAJA
		07	KAB. MAROS
		08	*)
		09	KAB. LUWU
		10	KAB. SINJAI
		11	KAB. BULUKUMBA
		12	KAB. BANTAENG

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		13	KAB. JENEPONTO
		14	KAB. SELAYAR
		15	KAB. TAKALAR
		16	KAB. BARRU
		17	KAB. SIDRAP
		18	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
		19	KAB. SOPPENG
		20	*)
		21	KAB. ENREKANG
		22	KAB. LUWU UTARA
		23	KOTA MAKASSAR
		24	KOTA PARE-PARE
		25	*)
		26	KOTA PALOPO
		27	KAB. LUWU TIMUR
		28	KAB. TORAJA UTARA
25	BALI	01	KAB. BULELENG
		02	KAB. JEMBRANA
		03	KAB. KLUNGKUNG
		04	KAB. GIANJAR
		05	KAB. KARANGASEM
		06	KAB. BANGLI
		07	KAB. BADUNG
		08	KAB. TABANAN
		09	KOTA DENPASAR
26	NUSA TENGGARA BARAT	01	KAB. LOMBOK BARAT
		02	KAB. LOMBOK TENGAH
		03	KAB. LOMBOK TIMUR
		04	KAB. BIMA
		05	KAB. SUMBAWA

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		06	KAB. DOMPU
		07	KOTA MATARAM
		08	KOTA BIMA
		09	KAB. SUMBAWA BARAT
		10	LOMBOK UTARA
27	MALUKU	01	KAB. MALUKU TENGAH
		02	KAB. MALUKU TENGGARA
		03	KAB. PULAU BURU
		04	KAB. MALUKU TENGGARA BARAT
		05	KOTA AMBON
		06	KAB. KEPULAUAN ARU
		07	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
		08	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
		09	KAB. BURU SELATAN
		10	KAB. MALUKU BARAT DAYA
		11	KOTA TUAL
28	PAPUA	01	KAB. JAYAPURA
		02	KAB. BIAK NUMFOR
		03	*)
		04	KAB. KEPULAUAN YAPEN (d.h. YAPEN WAROPEN)
		05	*)
		06	*)
		07	KAB. MERAUKE
		08	KAB. JAYAWIJAYA
		09	KAB. NABIRE
		10	*)
		11	KOTA JAYAPURA
		12	KAB. PUNCAK JAYA
		13	KAB. PANIAI
		14	KAB. MIMIKA

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		15	KAB. SARMI
		16	KAB. KEEROM
		17	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
		18	KAB. YAKUHIMO
		19	KAB. TOLIKARA
		20	KAB. BOVEN DIGOEL
		21	KAB. MAPPI
		22	KAB. ASMAT
		23	KAB. WAROPEN
		24	KAB. SUPIORI
		25	KAB. DEIYAI
		26	KAB. DOGIYAI
		27	KAB. INTAN JAYA
		28	KAB. LANNY JAYA
		29	KAB. MAMBERAMO RAYA
		30	KAB. MAMBERAMO TENGAH
		31	KAB. NDUGA
		32	KAB. PUNCAK
		33	KAB. YALIMO
29	NUSA TENGGARA TIMUR	01	KAB. KUPANG
		02	KAB. BELU
		03	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
		04	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN
		05	KAB. ALOR
		06	KAB. SIKKA
		07	KAB. FLORES TIMUR
		08	KAB. ENDE
		09	KAB. NGADA
		10	KAB. MANGGARAI
		11	KAB. SUMBA TIMUR
		12	KAB. SUMBA BARAT

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		13	KAB. LEMBATA
		14	KOTA KUPANG
		15	KAB. ROTE-NDAO
		16	KAB. MANGGARAI BARAT
		17	KAB. MALAKA
		18	KAB. MANGGARAI TIMUR
		19	KAB. NAGEKEO
		20	KAB. SABU RAIJUA
		21	KAB. SUMBA BARAT DAYA
		22	KAB. SUMBA TENGAH
30	MALUKU UTARA	01	KAB. HALMAHERA BARAT
		02	KAB. HALMAHERA TENGAH
		03	KOTA TERNATE
		04	KAB. HALMAHERA UTARA
		05	KAB. HALMAHERA SELATAN
		06	KAB. KEPULAUAN SULA
		07	KAB. HALMAHERA TIMUR
		08	KOTA TIDORE
		09	KAB. PULAU MOROTAI
		10	KAB. PULAU TALIABU
31	KEPULAUAN RIAU	01	KAB. RIAU KEPULAUAN
		02	KOTA TANJUNG PINANG
		03	KAB. KARIMUN
		04	KAB. NATUNA
		05	KOTA BATAM
		06	KAB. LINGGA
		07	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
32	PAPUA BARAT	01	KAB. FAK-FAK
		02	KAB. SORONG
		03	KAB. MANOKWARI
		04	KOTA SORONG

KODE PROVINSI		KODE KABUPATEN/KOTA	
1	2	3	4
		05	KAB. SORONG SELATAN
		06	KAB. RAJA AMPAT
		07	KAB. KAIMANA
		08	KAB. TELUK BINTUNI
		09	KAB. TELUK WONDAMA
		10	KAB. MANOKWARI SELATAN
		11	KAB. MAYBRAT
		12	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
		13	KAB. TAMBRAUW
33	SULAWESI BARAT	01	KAB. MAMUJU UTARA
		02	KAB. MAMUJU
		03	KAB. MAMASA
		04	KAB. POLEWALI MAMASA
		05	KAB. MAJENE
		06	KAB. MAMUJU TENGAH
34	KALIMANTAN UTARA	01	KAB. BULUNGAN
		02	KOTA TARAKAN
		03	KAB. MALINAU
		04	KAB. NUNUKAN
		05	KAB. TANA TIDUNG

*\*) kode mati, karena adanya pemekaran Provinsi atau Kabupaten/Kota.*

MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN